

SKRIPSI

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PSAK 101 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk (Studi Empiris pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016)



REZKY DZULHIJJANI

1310321119

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PSAK 101 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk (Studi Empiris pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016)



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

REZKY DZULHIJJANI

1310321119

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PSAK 101 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk (Studi Empiris pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016)

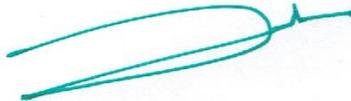
disusun dan diajukan oleh

REZKY DZULHIJJANI
1310321119

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 28 Sepetember 2017

Pembimbing



M. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PSAK 101 PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk (Studi Empiris pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016)

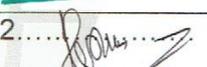
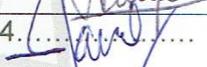
disusun dan diajukan oleh

REZKY DZULHIJJANI
1310321119

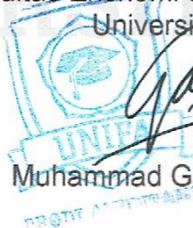
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **12 September 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Dr. A. Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Nurbayani, SE., M.Si	Anggota	3..... 
4.	Abdul Samad A., S.E., M.Si.	Eksternal	4..... 

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rezky Dzulhijjani

NIM : 1310321119

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 101 pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2017

Yang membuat pernyataan,



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PSAK 101 PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK. (STUDI EMPIRIS PADA BANK MUMALAT INDONESIA PERIODE 2016)”** yang dimana skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar. Serta Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyandang gelar Al-Amin dan teladan yang mulia.

Melalui kesempatan ini, penulis dengan tulus dan kerendahan hati ingin menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan demi terselesainya skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Penulis mengucapkan banyak – banyak terima kasih kepada kedua orang tua terkasih, yaitu Ayahanda Syahrul Alam dan Ibunda Rosmin, saudara dan saudari penulis Syafwan, Faizal Huzain, Adi Satyawan, Putri Bakhita yang senantiasa memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sady Abdul Djabar, MPA, selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
3. Dr. Ir. Mujahid, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

4. Bapak Muhammad Gafur SE., Msi., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
5. Bapak M. Ridwan Hasanuddin, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
6. Bapak dan Ibu dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Sitti Hapsari Majid, Sri Lenni Lestari, Linda Saenab, Farida Ainun, Nur Aeni, Kak Noorfaidah Zakaria, Kak Rahma Yulia Batseran, Kak Reshinda, Muhammad Anugrah, para sahabat tercinta yang selalu menemani dalam suka dan duka yang selama ini penulis hadapi dalam menyelesaikan kuliah di Universitas Fajar.
8. Teman-teman penulis di kampus angkatan 2013 baik jurusan akuntansi S1 maupun jurusan yang lain yang telah berjuang menyelesaikan perkuliahan selama lima tahun.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan yang dimiliki sebagai manusia biasa sehingga kemungkinan terdapat kekurangan maupun kekeliruan di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritikan yang sifatnya membangun guna melengkapi kekurangan yang ada senantiasa penulis harapkan sebagai masukan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan terutama bagi penulis sendiri.

ABSTRAK

Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 101 pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (Studi Empiris pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016)

**Rezky Dzulhijani
M. Ridwan Hasanuddin**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah diterapkan sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 101). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori yang diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif yang menghasilkan uraian-uraian yang menggambarkan subjek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. secara umum telah menerapkan standar yang ada yaitu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2014). Adapun mengenai beberapa penyajian informasi yang sedikit berbeda dari PSAK Nomor 101, hanya terbatas pada segi penyebutan istilah atau bahasa tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dari segi jumlah akun, akun-akun pada Bank Muamalat Indonesia lebih banyak dan lebih rinci dibandingkan jumlah akun yang terdapat dalam PSAK 101. Banyaknya jumlah akun pada suatu laporan keuangan tergantung pada kebutuhan suatu entitas yang dalam hal ini adalah entitas syariah.

Kata Kunci : Standar akuntansi syariah dan PSAK 101

ABSTRACT

Implementation of Sharia Accounting Standards SFAS 101 at PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (Emperical Study atBank Muamalat Indonesia Period 2016)

**Rezky Dzulhijani
M. Ridwan Hasanuddin**

This study aimed to know if the presentation of Sharia Financial Report in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. has been applied according to Sharia Accounting Standard (SFAS 101). Data collection method used in this study is library study as the theoretical basis obtained through books, previous studies and other written sources that related to the information required. This type of study is a comparative descriptive study that compares the similarities and differences between two or more facts and properties of the object under investigation.

The results of this study showed that PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, has generally applied the existing standard that based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) Number 101 concerning about presentation of Sharia Financial Statements (Revised 2014). Furthermore, the presentation of information slightly different from SFAS Number 101, it is just limited to the term or language but has the same purpose. In terms of number accounts, the accounts at Bank Muamalat Indonesia are more numerous and more detailed than the number of accounts contained in SFAS Number 101. The large number of accounts in a Financial Statements depends on the needs of an entity which in this case is a sharia entity.

Keywords : Sharia Accounting Standards and SFAS 101

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Bank.....	6
2.2 Pengertian Bank Syariah	7
2.3 Perkembangan Perbankan Syariah.....	8
2.4 Pengertian Akuntansi.....	9
2.5 Pengertian Akuntansi Syariah	10
2.6 Akuntansi Syariah di Indonesia	11
2.7 Analisis Laporan Keuangan Syariah	12
2.8 Keterbatasan-keterbatasan Laporan Keuangan	21
2.9 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah	22
2.10 Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia	23
2.11 Tujuan dan Peranan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah	25
2.12 Standar Akuntansi Syariah	26
2.13 Standar Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Syariah BerdasarkanPSAK 101 (Revisi 2014)	27
2.14 Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Rancangan Penelitian	45

3.2 Kehadiran Peneliti	45
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	46
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Metode Analisis Data	47
3.7 Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	49
4.2 Visi Misi	51
4.3 Struktur Organisasi.....	49
4.4 Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	57
4.4.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca	57
4.4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya....	62
4.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas	64
4.4.4 Laporan Arus Kas	64
4.4.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	65
4.4.6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	65
4.4.7 Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	65
4.4.8 Catatan atas Laporan Keuangan.....	66
BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Lapran Posisi Keuangan / Neraca (PSAK 101).....	35
2.2 Laporan Laba Rugi (PSAK 101)	36
2.3 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil (PSAK 101).....	38
2.4 Laporan Arus Kas (PSAK 101)	39
2.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat (PSAK 101)	40
2.6 Laporan Sumber Dana dan Penguunan Dana Kebajikan (PSAK 101)	41
2.7 Penelitian Terdahulu	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.3 Struktur Organisasi	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dewasa ini senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Karena itu diperlukan kebijakan ekonomi yang tepat dalam rangka memperbaiki perekonomian nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga untuk mencapai tujuan bangsa yang mulia itu salah satu sarana yang paling menunjang untuk mewujudkannya adalah melalui lembaga perbankan. Oleh karena itu lembaga ini mempunyai peranan vital dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat *familiar* oleh berbagai kalangan masyarakat secara global. Dalam dunia modern saat ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara adalah sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan senantiasa membutuhkan jasa perbankan. Bagi masyarakat di Negara-negara maju dan sedang berkembang, bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan.

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam terbukti dengan angka statistik populasi penduduk muslim Indonesia sebesar 85,1% dari total penduduk Indonesia. Namun, dalam perekonomian umat Islam berada dalam posisi minoritas. Karena itulah perlu dimulai perekonomian umat Islam Indonesia dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam perdagangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan suatu aktivitas yang dapat bernilai ibadah.

Kondisi perbankan di Indonesia mengalami masa-masa sulit yang membahayakan perekonomian nasional sebagai akibat dari krisis finansial yang terjadi sejak tahun 1997, yang dipicu oleh krisis nilai tukar. Krisis yang ditandai dengan likuidasi 16 bank swasta pada tanggal 1 November 1997 tersebut telah mengakibatkan merosotnya kinerja perekonomian nasional yang menimbulkan efek lanjut krisis berkepanjangan di berbagai bidang. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun drastis.

Krisis perbankan telah menunjukkan perlunya perbaikan ketentuan yang mengatur lembaga keuangan sekaligus memunculkan kembali wacana dan kebijakan pentingnya mengembangkan alternatif investasi melalui lembaga keuangan. Selama ini, masyarakat umumnya mengetahui bahwa suatu bank secara mutlak identik dengan bunga (Anshar Fuad:2008). Nasabah yang menyimpan dana di bank akan mendapatkan bunga, begitu juga nasabah debitur yang meminjam dana dari bank juga akan dikenakan bunga. Sedangkan bank mendapatkan keuntungan *differential interest* sebagai imbalan jasa-jasanya. Penerapan metode bunga diharapkan dapat mendorong investasi yang pada gilirannya dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, namun kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan perbankan yang pada akhirnya mendorong munculnya pemikiran untuk melakukan perombakan metode dasar ekonomi yang baru kepada tujuan keadilan, kesamaan, dan kemajuan. Salah satunya adalah dengan mencari alternatif selain metode bunga dalam dunia perbankan dan meletakkan perekonomian di atas landasan etika dan moral.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan

lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Berkembangnya perbankan Islam di beberapa negara tidak terlepas dari upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek-aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Di Indonesia perundang-undangan perbankan telah memberikan tempat bagi tumbuh dan berkembangnya perbankan Islam. Sehingga kegiatan usaha bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau yang disebut "Bank Berdasarkan Standar Syariah" dapat dilaksanakan. Ini berarti bahwa kegiatan usaha yang akan dilakukan bank syariah membutuhkan suatu informasi keuangan yang berdasarkan standar akuntansi syariah.

Untuk menciptakan struktur keuangan yang kokoh maka peranan akuntansi sebagai alat penyedia informasi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank syariah. Lebih dari itu akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian terciptalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat, kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hadirnya perbankan syariah didasari akan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah, atas dasar itu maka dibentuklah PSAK 101-110 yang mengatur tentang akuntansi syariah seperti

mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Akuntansi Salam, Akuntansi Istishna', Akuntansi Mudharabah, Akuntansi Musyarakah, Akuntansi Ijarah, Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah dan Akuntansi Sukuk. Khusus PSAK 101 (Revisi 2014) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 15 Oktober 2014 dan efektif per 1 Januari 2015, perbaikan standar ini menggantikan PSAK 101 (revisi 2011). Terjadinya perbaikan standar dalam penyajian laporan keuangan syariah menyebabkan lembaga-lembaga perbankan syariah harus melakukan penyesuaian terhadap standar yang baru. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat merupakan acuan bagi bank-bank syariah lainnya dalam menjalankan kegiatan operasional termasuk penerapan perbaikan standar yang berlaku. Dengan adanya standar khusus mengenai aturan penyajian laporan keuangan syariah tersebut maka setiap lembaga keuangan maupun non keuangan syariah di Indonesia dalam kegiatan usahanya wajib menerapkan hukum-hukum yang sesuai dengan PSAK 101 dan wajib melakukan penyesuaian apabila terjadi perbaikan standar akuntansi syariah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul mengenai :
"Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 101 pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (Studi Empiris pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016).

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah, apakah penyajian laporan keuangan syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah diterapkan sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 101)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah diterapkan sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 101).

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dibidang perbankan syariah dan penerapan standar akuntansi syariah di Indonesia. Serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi penerapan standar akuntansi syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan (Kasmir, 2014).

2.2 Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Terdapat dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Muhammad, 2014).

Di dalam Al-Qur'an sendiri istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan secara jelas, seperti zakat, *shadaqah*, *ghadimah* (rampasan perang), bai (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi dalam kegiatan ekonomi (Nuhung, 2014).

2.3 Perkembangan Perbankan Syariah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern; *neorivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan system *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adalah upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan Internasional Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di Negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan

Perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait (Antonio, 2015).

2.4 Pengertian Akuntansi

Akuntansi (*accounting*) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Salah satu unsur vital dalam mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi adalah kemampuan akuntan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang telah dilaporkan. Analisis meliputi penggunaan rasio, persentase, grafik, dan diagram untuk menyoroti tren-tren dan hubungan keuangan yang signifikan (Weygandth dkk, 2013). Menurut Ismail (2011) tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai. Dengan demikian, maka pencatatan akuntansi harus dilakukan secara cepat dan akurat sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna.

2.5 Pengertian Akuntansi Syariah

Secara etimologis akuntansi dalam bahasa Arab disebut dengan "*muhasabah*". Akar kata *muhasabah* adalah *h.s.b* dengan bentuk verbal atau kata kerja *hasaba*, bisa juga berasal dari kata *hasiba*, *hasiba* (menghitung dengan teliti atau seksama apa-apa yang telah tercatat), bentuk lainnya *yahsaba*

(menghitung, *to compute* atau mengukur, atau *to measure*) kemudian *muhasabah*. Kata kerja *hasaba* termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Sementara *al-hisab* atau *al-muhasabah* memiliki arti perhitungan, ada juga istilah *hisaab al-miizaaniyyah* yang memiliki arti perhitungan anggaran.

Kata *muhasabah* dalam Al-Qur'an muncul sebanyak 48 kali. Secara bahasa arti kata *muhasabah* adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya. Sedangkan kata *hisaba* yaitu menghitung dengan seksama atau teliti yang harus tercatat di surat-surat atau buku-buku.

Al-hisab dalam *muamalah* disebut dengan *hisaban*, yaitu untuk mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang, dan tidak pula lebih. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. Akuntansi syariah dapat digolongkan sebagai pengetahuan ilmu dalam bidang akuntansi yang memiliki karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai Islami, yang digali menggunakan epistemologi Islam. Kerangka konseptual akuntansi syariah dikembangkan menggunakan prinsip dasar paradigma syariah (Alma, 2014).

2.6 Akuntansi Syariah di Indonesia

Meskipun terkesan sebatas jadi *follower* di era modern ini tetapi perubahan ke arah yang lebih baik selalu ada. Wujud dari dorongan tersebut salah satunya adalah munculnya gagasan pengembangan akuntansi syariah.

Penerapan akuntansi syariah dalam beberapa waktu ini menjadi fakta, termasuk di Indonesia. Banyak pelopor gagasan akuntansi syariah di Indonesia, diantaranya adalah Iwan Triwiyono yang mengenalkan konstruk “Akuntansi Syariah” dan menerbitkan buku “*Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*”.

Dalam akuntansi modern yang ada sekarang ini melekat berbagai karakteristik yang mengarah pada satu sisi yang bias, yaitu egois, maskulin, materialistik, “bintang ekonomi”, logosentrik, dan impersonal. Dampaknya, akuntansi modern dipertanyakan keandalannya karena dipertimbangkan tidak mampu mengakomodasi dan merefleksikan bisnis yang berlangsung. Selanjutnya, manusia sebagai pengguna akuntansi menjadi terlalu fokus pada unsur materi dengan melupakan peran penting unsur spiritual. Hal ini merupakan kondisi yang berbahaya dan tidak kondusif karena manusia menjadi tidak siap kembali kepada ALLAH SWT.

Kondisi akuntansi modern yang memprihatinkan ini tidak dapat dilepaskan dari perspektif yang digunakan dalam pengembangan akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi syariah merupakan gagasan untuk melihat akuntansi dari perspektif yang benar, dan hal ini merupakan tanggungjawab umat Islam untuk melakukan perubahan tersebut. Perspektif yang seharusnya digunakan adalah perspektif *Khalifatullah Fil Ardh* (manusia sebagai khalifah [wakil] Tuhan di muka bumi) yang pada gilirannya akuntansi syariah yang dikembangkan akan sarat dengan nilai-nilai syariah.

Berlandas perspektif *Khalifatullah Fil Ardh* maka dapat diformulasikan landasan filosofi, metodologi, dan teori akuntansi syariah. Perspektif ini juga digunakan untuk menafsirkan kata yang terdapat dalam kitab Al-Qur’an. Dalam tatanan konkrit, penciptaan simbol-simbol akuntansi yang mencerminkan konsistensi perspektif *Khalifatullah Fil Ardh* dilakukan berdasar “*epistemology*

berpasangan” yang diangkat dari SunnatuLLAH yang terhampar di alam semesta ini. Dengan metodologi ini maka akuntansi syariah diharapkan dapat mengantarkan manusia pada kesadaran ketuhanan (Warsono, 2012).

2.7 Analisis Laporan Keuangan Syariah

Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:

1. *Shahibul maal*/pemiik dana;
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;
3. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah;
4. Pemegang saham;
5. Otoritas pengawas;
6. Bank Indonesia;
7. Pemerintah;
8. Lembaga penjamin simpanan;
9. Masyarakat.

Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi:

1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan;
2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang;
3. Mengenai sumber daya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas

lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat memengaruhi perubahan sumber daya tersebut;

4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat; dan
6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka:

1. Tanggung jawab atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Komponen laporan keuangan
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen seperti, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*, laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dan catatan atas laporan keuangan.
3. Bahasa laporan keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa

Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi yang sama dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.

4. Mata uang pelaporan

Mata uang pelaporan harus dalam rupiah. Apabila transaksi keuangan menggunakan mata uang asing selain rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Kebijakan akuntansi

Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

6. Penyajian

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, perubahan investasi terikat, sumber dan penggunaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*, sumber dan penggunaan dana *qardhul*

hasan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditasnya, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan investasi tidak terikat disajikan dalam unsur tersendiri.
- c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai yang istimewa.
- d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam komponen laporan keuangan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan pokok, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak akan menyesatkan pembaca. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain, mengenai:
 - 1) Gambaran umum bank syariah;
 - 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

- 3) Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan; dan
- 4) Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau presentase.

f. Perubahan akuntansi wajib memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode-periode berikutnya.

2) Perubahan kebijakan akuntansi

a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

- (1) Terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
- (2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan;
- (3) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

- g. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*, laporan sumber dan penghasilan dana *qardhul hasan* harus diberi pernyataan “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.
- h. Disamping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan bagi bank yang telah *go public* wajib pula mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.

7. Konsistensi penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan atas periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan; atau
 - 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK.
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

8. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas;
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material

dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis;

- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*) informasi tersebut keputusan yang diambil.

9. Saling hapus (*offsetting*)

- a. Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva dan kewajiban.
- b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan kecuali berhubungan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud pada 10.a.

10. Periode pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, merger atau akuisisi atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*,

laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak dapat diperbandingkan.

11. Informasi komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

12. Laporan keuangan interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan tahunan dan dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan atau periode yang lain yang kurang dari satu tahun.
- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*, laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* dan catatan atas laporan keuangan.

13. Laporan keuangan konsolidasi

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, ekuitas, pendapatan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi;
- b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi;
- c. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan, keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal pelaporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
 - (1) Perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari tiga bulan; dan
 - (2) Peristiwa atau transaksi material yang terjadi diantara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi.

Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan.

- d. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- e. Hak minoritas (*minority interest*) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal. Sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.

(Muhammad, 2014)

2.8 Keterbatasan-Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja;
3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil;
4. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas);

5. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan;
6. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
7. Hanya melaporkan informasi yang material;
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank;
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

(Muhammad, 2014)

2.9 Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLKS memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah.

Berdasarkan KDPPLKS, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:

1. Persaudaraan (*ukhuwah*);
2. Keadilan (*'adalah*);
3. Kemaslahatan (*maslahah*);
4. Keseimbangan (*tawazun*);
5. Universalisme (*syumuliyah*).

Beberapa karakteristik transaksi syariah yang disebutkan dalam KDPPLKS diantaranya:

1. Tidak mengandung unsur riba;
2. Tidak mengandung unsur kezaliman;
3. Tidak mengandung unsur *masyir*;
4. Tidak mengandung unsur *gharar*;
5. Tidak mengandung unsur *haram*.

(www.iaiglobal.or.id)

2.10 Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia

Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Bank Syariah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan Syariah (KDPPLKS). Penyempurnaan KDPPLKS terhadap KDPPLKBS dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah.

Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam *Exposure Draft* KDPPLKS dan evaluasi penulis terhadap KDPPLKS yang telah disahkan, terdapat perbedaan sistematika penulisan KDPPLKS dengan KDPPLKBS (2002). Sistematika KDPPLKBS (2002) hanya

menyajikan kerangka dasar yang berbeda atau bersifat tambahan dari KDPPLK (2004) dan jika tidak diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPPLK (1994) dianggap juga berlaku untuk bank syariah. Sementara itu pada KDPPLKS, seluruh kerangka dasar dituliskan dengan tujuan agar pengguna dapat lebih mudah memahami KDPPLKS dalam satu kesatuan secara utuh.

Pada bagian pendahuluan KDPPLKS, dilakukan penyempurnaan, khususnya mengenai pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Pada bagian Tujuan Laporan Keuangan terdapat tambahan tujuan selain yang diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan:

1. Pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah; dan
2. Pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah.

Pada bagian Asumsi Dasar, selain diatur asumsi “dasar akrual” dan “kelangsungan usaha (*going concern*)”, juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas. Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan dari laba bruto (*gross profit*). Sementara itu, bagian Unsur-unsur Laporan Keuangan mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara lain kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah;
2. Unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas;

3. Unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas.

Bagian Pengukuran Unsur mengatur bahwa dasar pengukuran unsur adalah dalam laporan keuangan syariah yang dapat digunakan adalah biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi/penyelesaian (Yaya dkk, 2013).

2.11 Tujuan Dan Peranan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan KDPPLKS, disebutkan bahwa KDPPLKS bertujuan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar;
2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum;
4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah (Yaya dkk, 2013).

2.12 Standar Akuntansi Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis

syariah. Menurut Alma (2014) badan yang menerbitkan standar akuntansi syariah berdasarkan ajaran Islam pada saat ini adalah *the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAO-IFI) yang didirikan sejak 1991 di Bahrain. Sampai dengan saat ini telah diterbitkan 56 standar akuntansi Islam dalam bidang akuntansi, auditing, *governance* dan etika. Anggota *Technical Board* AAOIFI berjumlah 20 orang, dengan 115 anggota yang mewakili 27 negara. Saat ini juga sedang disusun program *Certified Islamic Public Accountant* (CIPA) yang akan segera disebarluaskan ke beberapa Negara.

Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia dilakukan IAI dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN), serta pelaku perbankan syariah dan dengan mempertimbangkan standar yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah internasional yaitu AAOIFI. Hal ini dimaksudkan agar standar yang digunakan selaras dengan standar akuntansi keuangan syariah internasional.

Menurut Martani dkk (2012) standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *ijarah*, dan *istishna*. Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah. Berikut ini daftar Standar Akuntansi Keuangan yang juga berlaku bagi perbankan syariah:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
2. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2014);

3. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah (2007);
4. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam (2007);
5. PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna' (2007);
6. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (2007);
7. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah (2007);
8. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah (2009);
9. PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (2009);
10. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak atau Sedekah (2010);
11. PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk (2015).

2.13 Standar Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan Psak 101 (Revisi Tahun 2014)

1. Periode Pelaporan

Laporan Keuangan setidaknya disajikan secara tahunan.

2. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- c. Laporan perubahan ekuitas;
- d. Laporan arus kas;
- e. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- g. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
- h. Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Informasi yang Disajikan dalam Laporan Keuangan

- a. Bank syariah menyajikan dalam laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset

- 1) Kas;
- 2) Penempatan pada Bank Indonesia;
- 3) Penempatan pada bank lain;
- 4) Investasi pada surat berharga;
- 5) Piutang:
 - (a) Piutang murabahah;
 - (b) Piutang istishna';
 - (c) Piutang pendapatan ijarah.
- 6) Pembiayaan;
 - (a) Pembiayaan mudharabah;
 - (b) Pembiayaan musyarakah.
- 7) Tagihan dan liabilitas akseptasi;
- 8) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah);
- 9) Aset yang diperoleh untuk ijarah;
- 10) Aset istishna' dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin istishna');
- 11) Piutang salam;
- 12) Investasi yang dicatat dengan metode ekuitas;
- 13) Aset tetap.

Liabilitas

- 1) Liabilitas segera;

- 2) Bagi hasil yang belum dibagikan;
- 3) Simpanan:
 - (a) Giro wadiah;
 - (b) Tabungan wadiah.
- 4) Simpanan bank lain:
 - (a) Giro wadiah;
 - (b) Tabungan wadiah.
- 5) Utang salam;
- 6) Utang istishna’;
- 7) Liabilitas kepada bank lain;
- 8) Pembiayaan yang diterima;
- 9) Utang pajak;
- 10) Pinjaman yang diterima;
- 11) Pinjaman subordinasi.

Dana Syirkah Temporer

- 1) Syirkah temporer dari bukan bank:
 - (a) Tabungan mudharabah;
 - (b) Deposito mudharabah.
- 2) Syirkah temporer dari bank:
 - (a) Tabungan mudharabah;
 - (b) Deposito mudharabah.

Ekuitas

- 1) Modal disetor;
- 2) Tambahan modal disetor;
- 3) Penghasilan komprehensif lain;
- 4) Saldo laba; dan
- 5) Kepentingan non pengendali.

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bank syariah disusun dengan mengacu pada SAK lain untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

- 1) Pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai mudharib
 - (a) Pendapatan dari jual beli:
 - (1) Pendapatan marjin murabahah;
 - (2) Pendapatan neto salam paralel;
 - (3) Pendapatn neto istishna' paralel.
 - (b) Pendapatan dari sewa
 - (c) Pendapatan dari bagi hasil:
 - (1) Pendapatan bagi hasil mudharabah;
 - (2) Pendapatan bagi hasil musyarakah.
- 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer;
- 3) Pendapatan usaha lain:
 - (a) Pendapatan imbalan jasa perbankan;
 - (b) Pendapatan imbalan investasi terikat.
- 4) Beban usaha;
- 5) Laba usaha;
- 6) Pendapatan non usaha;
- 7) Beban non usaha;
- 8) Beban pajak penghasilan;
- 9) Laba neto;
- 10) Penghasilan komprehensif lain;

11) Total penghasilan komprehensif.

c. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Total penghasilan komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali;
- 2) Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan;
- 3) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - (a) Laba rugi;
 - (b) Penghasilan komprehensif lain;
 - (c) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

d. Laporan arus kas

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2: laporan arus kas

mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.

e. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan:

- 1) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* (akrual);
- 2) Penyesuaian atas:
 - (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - (b) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
- 3) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- 4) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- 5) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
 - (a) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;

(b) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

- 1) Dana zakat berasal dari wajib zakat
 - (a) dari dalam entitas syariah;
 - (b) dari pihak luar entitas syariah;
- 2) Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Kenaikan atau penurunan dana zakat;
- 4) Saldo awal dana zakat; dan
- 5) Saldo akhir dana zakat.

g. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

- 1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - (a) Infak;
 - (b) Sedekah;
 - (c) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - (d) Pengembalian dana kebajikan produktif;
 - (e) Denda;
 - (f) Penerimaan non halal.
- 2) Penggunaan dana kebajikan untuk
 - (a) Dana kebajikan produktif;
 - (b) Sumbangan; dan

(c) Penggunaan lain untuk kepentingan umum.

- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- 4) Saldo awal dana kebajikan;
- 5) Saldo akhir dana kebajikan.

h. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik;
- 2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan;
- 3) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lain, entitas syariah biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK;
- 2) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
- 3) Informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos;
dan
- 4) Pengungkapan lain, termasuk:

- (a) Liabilitas kontijensi (PSAK 57: Provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontijensi) dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan
- (b) Pengungkapan informasi non keuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (PSAK 60: instrumen keuangan: pengungkapan (PSAK101:IAI))

4. Format Laporan Keuangan Bank Syariah

- a. Laporan posisi keuangan (Neraca)

Tabel 2.1
PT. Bank Syariah "X"
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

ASET		LIABILITAS	
Kas	xxx	Liabilitas segera	xxx
Penempatan pada BI	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	Simpanan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan dari bank lain	xxx
Piutang:		Utang:	
Murabahah	xxx	Salam	xxx
Istishna'	xxx	Istishna'	xxx
Ijarah	xxx	Liabilitas kepada bank lain	xxx
Pembiayaan:		Pembiayaan yang diterima	xxx
Mudharabah	xxx	Utang pajak	xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah	xxx
Aset ijarah	xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Piutang salam	xxx	Tabungan mudharabah	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	Deposito mudharabah	xxx
Aset tetap	xxx	Dana syirkah temporer dari bank:	
		Tabungan mudharabah	xxx
		Deposito mudharabah	xxx
		Musyarakah	xxx
		Jumlah	xxx

		EKUITAS	
		Ekuitas pemilik entitas induk	xxxx
		Modal disetor	xxxx
		Tambahan modal disetor	xxxx
		Penghasilan komprehensif lain	xxxx
		Saldo laba	
		Kepentingan non pengendali	xxxx
		Jumlah	xxxx
		Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah	
Jumlah Aset	xxxx	Temporer dan Ekuitas	xxxx

Sumber: PSAK Nomor 101 (Revisi 2014)

b. Laporan laba rugi

Tabel 2.2
PT Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari S/D 31 Desember 20X1

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxxx
Pendapatan neto salam paralel	xxxx
Pendapatan neto istishna' paralel	xxxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxxx
Pendapatan usaha utama lain	xxxx
Jumlah	xxxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxxx
PENDAPATAN USAHA LAIN	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxxx
Jumlah	xxxx
BEBAN USAHA	
Beban kepegawaian	(xxxx)
Beban administrasi	(xxxx)

Beban penyusutan dan amortisasi	(xxxx)
Beban usaha lain	(xxxx)
Jumlah	(xxxx)
LABA USAHA	xxxx
PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA	
Penghasilan non usaha	xxxx
Beban non usaha	(xxxx)
Jumlah	xxxx
LABA SEBELUM PAJAK	xxxx
Beban pajak penghasilan	(xxxx)
PENGHASILAN NETO	xxxx
Penghasilan neto yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxxx
Kepentingan non pengendali	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi	
Surplus revaluasi	xxxx
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	xxxx
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	xxxx
Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxxx
Penyusutan nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"	xxxx
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan di reklasifikasi laba rugi	xxxx
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxxx
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat di atribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxxx
Kepentingan non pengendali	xxxx

Sumber: PSAK Nomor 101 (Revisi 2014)

c. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Tabel 2.3
PT Bank Syariah "X"
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG	xxxx
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna'	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah	(xxx)
PENAMBAH	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Margin murabahah	xxx
Istishna'	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
Jumlah	xxx
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	xxxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil bagi hasil yang sudah di distribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil bagi hasil yang belum di distribusikan	xxx

Sumber: PSAK Nomor 101 (Revisi 2014)

d. Laporan Arus Kas

Tabel 2.4
PT Bank Syariah "X"
Laporan Arus Kas
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1

Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan bunga dan komisi	xxxx	
Pembayaran bunga	(xxxx)	
Pembayaran piutang yang sebelumnya telah dihapus	xxxx	
Pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok	(xxxx)	
	xxxx	
(Kenaikan) penurunan dalam aset operasi:		
Dana jangka pendek	(xxxx)	
Deposito yang dimiliki untuk tujuan pengendalian moneter	xxxxx	
Dana uang muka kepada pelanggan	(xxxx)	
Kenaikan bersih piutang kartu kredit	(xxxx)	
Efek jangka pendek lain yang diperjualbelikan	(xxxx)	
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:		
Deposito dari pelanggan	xxxx	
Serifikat deposito yang diperjualbelikan	(xxxx)	
Kas neto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	xxxx	
Pajak penghasilan	(xxxx)	
Kas neto dari aktivitas operasi		xxxx
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pelepasan entitas anak Y	xxxx	
Dividen yang diterima	xxxx	
Bunga yang diterima	xxxx	
Hasil penjualan efek yang tidak diperjualbelikan	xxxx	
Pembelian aset tetap	(xxxx)	
Kas neto dari aktivitas investasi		xxxx

Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerbitan modal pinjaman	xxxx	
Penerbitan saham preferen oleh entitas anak	xxxx	
Pelunasan pinjaman jangka panjang	(xxxx)	
Penurunan neto pinjaman lain	(xxxx)	
Pembayaran deviden	(xxxx)	
Kas neto dari aktivitas pendanaan		xxxx
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas		xxxx
Kenaikan neto aks dan setara kas		xxxx
Kas dan setara kas pada awal periode		xxxx
Kas dan setara kas pada akhir periode		xxxx

Sumber: PSAK Nomor 2 (Revisi 2014)

e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

Tabel 2.5
PT Bank Syariah "X"
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1

SUMBER DANA ZAKAT	
Zakat dari internal bank syariah	xxxx
Zakat dari eksternal bank syariah	xxxx
Jumlah	xxxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxxx)
KENAIKAN	xxxx
SALDO AWAL	xxxx
SALDO AKHIR	xxxx

Sumber: PSAK Nomor 101 (Revisi 2014)

f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Tabel 2.6
PT Bank Syariah "X"
Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1

SUMBER DANA KEBAJIKAN	
Infak dari bank syariah	xxxx
Sedekah	xxxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxxx
Denda	xxxx
Pendapatan non halal	xxxx
Jumlah	xxxx
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan produktif	(xxxx)
Sumbangan	(xxxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxxx)
Jumlah	(xxxx)
KENAIKAN	
xxxxx	
SALDO AWAL	
xxxxx	
SALDO AKHIR	
xxxxx	

Sumber: PSAK Nomor 101 (Revisi 2014)

2.14 Penelitian Terdahulu

Penelitian/ Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
Faud Anshar / 2008	Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah pada PT. Bank Rakyat Indonesia	1. Bagaimana penerapan akuntansi perbankan syariah berdasarkan teori dan Standar Akuntansi Keuangan Nomor. 102 yang	1. Karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan mengenai akuntansi <i>murabahah</i> telah dinyatakan dalam PSAK No. 102 oleh Dewan

	(Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar	<p>berkaitan dengan prinsip akuntansi <i>murabahah</i>?</p> <p>2. Bagaimana penerapan akuntansi <i>murabahah</i> pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Makassar saat ini?</p>	<p>Standar Akuntansi Keuangan-IAI yang mana aturan tersebut merupakan teori sekaligus prinsip atas penerapan akuntansi <i>murabahah</i> yang diterapkan disetiap lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan.</p> <p>2. Penerapan akuntansi <i>murabahah</i> pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar berdasarkan pada pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang juga mengacu pada PSAK No. 102 yang selama ini telah digunakan mencakup karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta jurnal pencatatan atas peristiwa yang berkaitan dengan akuntansi <i>murabahah</i> yang meliputi semua proses pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> mulai dari pengadaan aktiva, proses akad pembiayaan, hingga</p>
--	---------------------------------------	---	---

			penyelesaian pembiayaan serta beberapa kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> .
Angriani / 2015	Penerapan Syariah <i>Compliance</i> sebagai Prinsip Syariah <i>Governance</i> pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Makassar	<p>1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam hal ini syariah <i>compliance</i> pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Makassar terkait penyusunan laporan keuangan?</p> <p>2. Bagaimana realitas prinsip <i>ukhuwah</i>, <i>tawazun</i>, <i>universalisme</i> dan <i>masalahah</i> dalam mewujudkan tujuan akuntansi syariah & menyeimbangkan karakteristik laporan keuangan?</p>	<p>1. Penerapan prinsip syariah terkait dengan penyusunan laporan keuangan pada Bank Muamalat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, hal ini sejalan dengan teori kepatuhan / syariah <i>compliance</i> dan konsep <i>masalahah</i>. Karena laporan keuangan mengandung informasi sejauh mana pengelolaan kinerja Bank Muamalat baik yang terkait dengan kinerja operasional maupun bernilai sosial.</p> <p>2. Penerapan prinsip <i>ukhuwah</i> pada Bank Muamalat diwujudkan melalui pembiayaan bank yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, seperti dalam penetapan margin keuntungan, nisbah bagi hasil sampai kepada penentuan periode pembayaran yang didasarkan pada</p>

			<p>keepakatan. Sedangkan penerapan prinsip <i>tawazun</i>, universalisme dan masalah dilakukan melalui kegiatan sosial dari dana CSR dan zakat. Dengan adanya penerpan zakat maka tujuan dari Bank Muamalat bukan lagi <i>profit-oriented</i> melainkan <i>zakat-oriented</i>. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut melalui zakat maka Bank Mumalat Cab. Makassar dapat menyeimbangkan karakter laporan keuangan yaitu antara egoistik dan alturistik, materialistik dan spiritualistik serta kuantitatif dan kualitatif.</p>
--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti dengan tepat. Dalam metode deskriptif peneliti dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Penelitian ini menggunakan metode studi empiris yang merupakan penelitian dengan tujuan mencari generalisasi atas suatu pertanyaan yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti. Sehingga peran manusia sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan. Dalam penelitian ini, posisi peneliti adalah sebagai instrumen kunci (*the key instrument*) artinya peneliti terlibat langsung terhadap subjek penelitian. Dengan hadir dan terlibatnya peneliti secara langsung, peneliti dapat lebih mudah menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian serta lebih memungkinkan peneliti mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang

atau tidak sesuai. Selain itu, peneliti juga memiliki peran sebagai partisipan penuh artinya peneliti merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri.

3.3 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan (Juli-September) dimulai sejak diterimanya proposal penelitian ini. Berdasarkan dengan topik penelitian maka perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang berlokasi di Jl. Prof Dr Satrio, Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian didasari pertimbangan bahwa Bank Muamalat merupakan bank umum syariah yang pertama dan terbesar di Indonesia, disamping itu juga pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang amat pesat di Indonesia sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif yang mencakup:

1. Gambaran umum perusahaan
2. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah

Sedangkan sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder merupakan data yang bersumber dari pencatatan dokumentasi yang dimiliki Bank Muamalat serta pencatatan yang bersumber dari hasil peneliti lain, buku-buku (literatur) yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu. Dalam hal ini data diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam usaha untuk mencapai tujuan penelitian, maka langkah/metode yang ditempuh penulis dalam menjawab dan mencapai tujuan penelitian adalah:

1. Mengumpulkan bahan/referensi teori yang berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (PSAK Nomor 101).
2. Mengumpulkan informasi tentang bagaimana penerapan standar akuntansi syariah mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang terdapat pada literatur ataupun standar yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Membandingkan antara penerapan penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah pada perusahaan dengan standar akuntansi syariah berdasarkan PSAK 101.

3.7 Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

- a. Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan.

- b. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data, yaitu buku-buku, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi.
- c. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi *Takafu*), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi *Mudharabah*. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 363 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (*mobile branch*) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Electronic Payment System*(MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-IjarahIndonesia Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan *Baitulmaal* Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*” (www.bankmuamalat.co.id)

4.2 Visi Misi

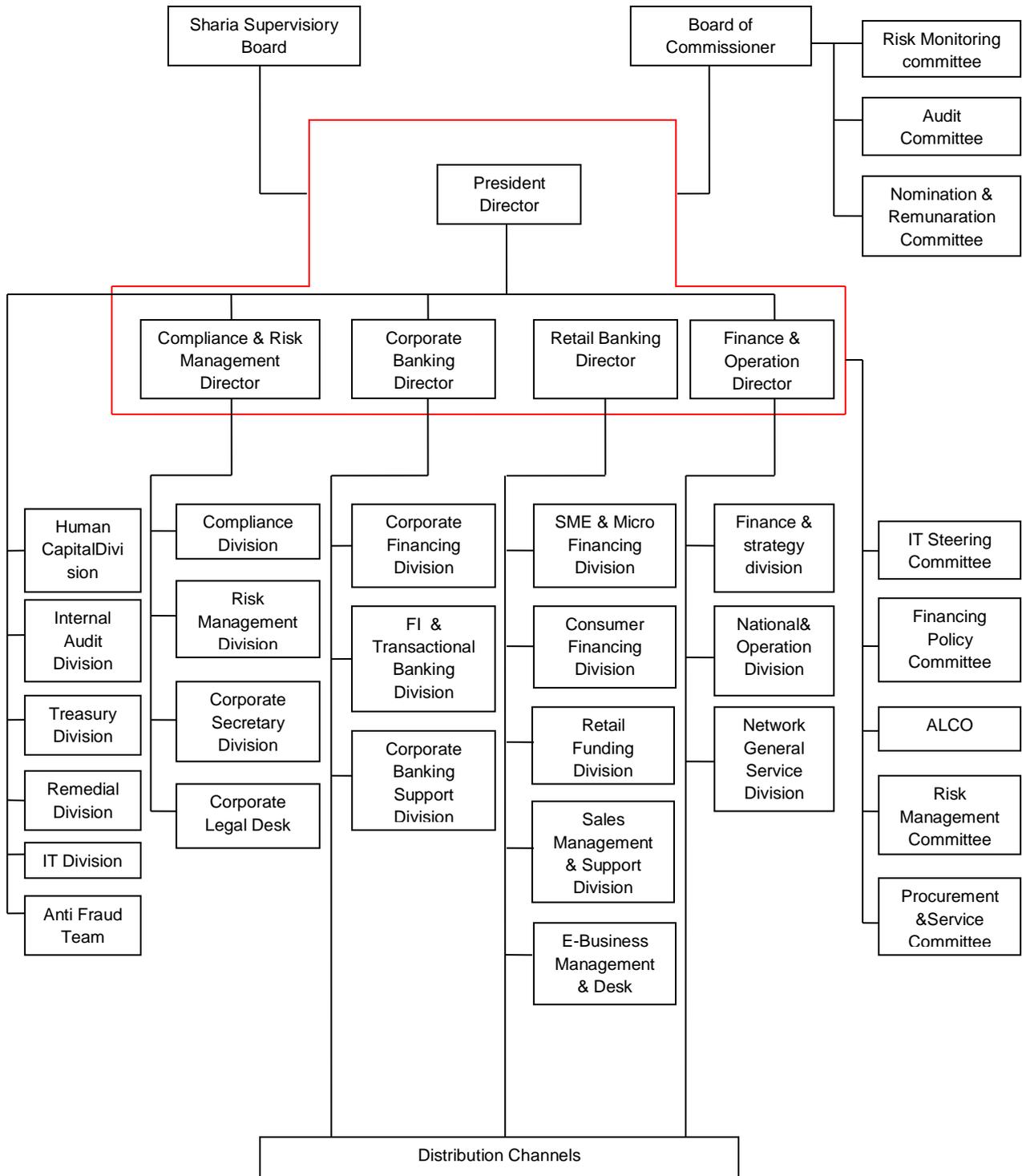
a. Visi

The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia

Sumber : www.bankmuamalat.co.id, 2017

Pada bank muamalat Indonesia menggunakan struktur organisasi fungsional karena didasarkan pada pemisahan fungsi-fungsi:

1. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan.

2. Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*)

Dewan pengawas syariah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah;
- b. Meneliti dan membuka rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

3. Dewan Direksi (*Board of Direction*)

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank Muamalat. Secara umum tugas dan tanggungjawab direksi adalah:

- a. Memastikan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi bagi Perseroan secara berkesinambungan;
- b. Menerapkan *good corporate governance* sesuai dengan prinsip dan praktek *good corporate governance*;
- c. Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien;
- d. Memantau risiko dan mengelolanya;

- e. Melaporkan kinerja Perseroan secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam RUPS.

4. Administrasi Group

Ruang lingkup kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap Kantor Cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional;
- b. Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan *monitoring* Laporan-laporan Bulanan Keuangan Bank;
- c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan dan seleksi calon karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitor dan memelihara data base kepersonaliaan;
- d. Melakukan proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (Pph 21) seluruh karyawan serta pengurus bank.

5. *Corporate Support Group*

Ruang lingkup kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan *legal action* atas kebijakan manajemen;
- b. Memberikan masukan dalam penyusunan manual, periodic, akad, dan keputusan yang terkait dengan aspek hukum;
- c. Meningkatkan pengetahuan positif masyarakat tentang Bank Muamalat Indonesia;
- d. Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada *emotional market*;

- e. Meraih dukungan moril maupun materil dari *stakeholder* maupun *new investor*.

6. *Internal Audit Group*

Ruang lingkup kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit;
- b. Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern;
- c. Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah dilaksanakan;
- d. Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan dan efektifitas atau kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan;
- e. Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya menjadikan bank lebih maju.

7. *Business Development Group*

Ruang lingkup kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Pemasaran
 - 1) *Customer Service* mempunyai tugas:
 - a) Memberikan informasi produk bank;
 - b) Melayani pembukaan dan penutupan rekening;
 - c) *Handling Complaint*;
 - d) Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa bank seperti transfer, inkaso, pemindah bukuan antar rekening nasabah;
 - e) Melaksanakan tugas lainnya yang ditunjuk atasan.

2) *Marketing Staff*

a) *Marketing Funding* mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Bertanggung jawab atas pencapaian target penghimpunan;
- (2) Merancang dan merealisasikan strategi bisnis penghimpunan dana.

b) *Marketing lending* mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan;
- (2) Mempunyai kemampuan menganalisis pembiayaan;
- (3) Memproses dan merealisasikan pembiayaan.

b. Produk dan *Development*

- 1) Melakukan riset, survey, dan pengembangan produk;
- 2) Melakukan review produk dan fitur produk;
- 3) Merumuskan tariff layanan produk.

c. SISOP dan UAT (*USSER Acceptance Test*)

- 1) Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur peraturan atau kebijakan pribadi;
- 2) Menyebarkan ketentuan pemerintah seperti SEBI, PP, Undang-undang dan sejenisnya untuk bidang operasi bank;
- 3) Sosialisasi dan implementasi prosedur yang telah dibuat dan direvisi;
- 4) Memantau dan melakukan supervisi terhadap layanan dan operasi;
- 5) Melakukan UAT atas produk atau program yang akan diluncurkan.

d. *Financing Support Group*

Ruang lingkup kerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) *Financing Supervision;*
- 2) *Sharia Financial Institution;*
- 3) *Financing Product Development.*

e. *Network and Alliance Group*

Ruang lingkup kerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) *Network Alliance (POS, Da'l Muamalat, Pegadaian);*
- 2) *Shar-E and Geari Optimizing;*
- 3) *Virtual Banking Operation (Call Center and Card Center).*

4.4 Laporan Keuangan Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

4.4.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca

1. Aset

Aset Bank Muamalat Indonesia di akhir tahun 2016 terkoreksi 2,37% dari Rp 57,14 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 55,79 triliun. Penurunan aset tersebut banyak dikontribusikan oleh turunnya Investasi pada Surat Berharga dan Giro pada Bank Lain. Sementara itu, Tagihan Akseptasi Lain dan Pinjaman Qardh mengalami peningkatan.

a. Kas dan Penempatan pada BI

Kas bank Muamalat Indonesia di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 25,33%. Bank Muamalat Indonesia senantiasa berusaha untuk menjaga rasio kas terhadap total aset agar tetap berada pada level yang optimal. Di samping itu, Penempatan pada BI mengalami kenaikan sebesar 0,49%.

b. Investasi pada Surat Berharga

Untuk tetap mengelola likuiditas, Bank Muamalat Indonesia melakukan penempatan pada instrument *money market* bank syariah seperti penempatan di BI. Proporsi investasi pada surat berharga dari total aset lancar mengalami penurunan dari sebesar 36,32% di tahun 2015 menjadi 35,02% pada tahun 2016. Jika dilihat dari sisi nominal juga jumlah yang di investasikan mengalami penurunan sebesar 14,95%.

c. Penyaluran dana

Bank Muamalat Indonesia menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan produktif maupun konsumtif, yang dibukukan berdasarkan akad atau skema yang dipakai yaitu sebagai piutang jual beli, pinjaman Qardh, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan Ijarah. Pada akhir tahun 2016 jumlah penyaluran dana turun sebesar 1,71% dari jumlah pembiayaan pada tahun sebelumnya. Penurunan penyaluran dana, secara umum, disebabkan oleh fokus bisnis Bank Muamalat Indonesia yang bertumpu pada perbaikan kualitas penyaluran dana.

d. Aset tetap

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016 memiliki aset tetap senilai Rp 2,64 triliun, atau meningkat sebesar 6,16% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 2,49 triliun.

e. Aset lain-lain

Aset lain-lain Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Pendapatan yang Masih Akan Diterima, Agunan yang Diambil Alih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, Biaya Dibayar

Dimuka, Tagihan *Usance Payable*, Aset Tak Berwujud-bersih, Uang Muka, Tagihan ATM, Tagihan kepada Pihak Ketiga setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, Persediaan Alat Tulis Kantor, Setoran Jaminan, Beban Tanggungan Emisi Sukuk, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dan lainnya. Posisi aset lain-lain pada tahun 2016 menurun sebesar 6,29% dari tahun 2015.

2. Likuiditas

Jumlah liabilitas Bank Muamalat Indonesia pada akhir tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,86% dari tahun 2015. Penurunan terbesar liabilitas disumbang oleh jumlah Liabilitas Akseptasi sebesar 48,66%.

a. Liabilitas segera

Posisi liabilitas segera pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 175,05 miliar atau mengalami penurunan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 178,66 miliar.

b. Bagi hasil yang belum dibagikan

Bagi hasil yang belum dibagikan merupakan bagi hasil yang belum dibagikan Perseroan kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Perseroan yang telah disisihkan dari pengelolaan dana Mudharabah. Posisi Bagi Hasil yang Belum Dibagikan mengalami penurunan dari Rp 82,99 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 55,76 miliar pada tahun 2016.

c. Simpanan

Saldi simpanan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 5,51 triliun yang terdiri dari Giro Wadiah sebesar Rp 3,27 triliun, tabungan wadiah sebesar Rp 2,24 triliun. Simpanan dari nasabah Bank

Muamalat Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,45% dari posisi tahun 2015, yang disebabkan oleh turunnya saldo giro wadiah sebesar 11,40% dibandingkan posisi Desember 2015. Meskipun penurunan terjadi pada giro wadiah, Bank Muamalat Indonesia tetap berusaha untuk dapat meningkatkan serapan dana dari masyarakat melalui fasilitas tabungan wadiah dimana pada tahun 2016 tabungan wadiah meningkat 14,47% dibanding tahun 2015.

d. Simpanan dari bank lain

Hingga akhir tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia memiliki simpanan dari bank lain sebesar 150,63% dari tahun 2015.

e. Utang pajak

Utang pajak yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia pada akhir tahun 2016 tercatat mengalami peningkatan sebesar 14,84% dari akhir tahun 2015.

f. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan sebesar 43,12%.

g. Liabilitas imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 140,86 miliar, mengalami penurunan dari tahun 2015 yang sebesar Rp 204,71 miliar.

h. Liabilitas lainnya

Pada tahun 2016, liabilitas lainnya yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia mencapai Rp 446,57 miliar, mengalami kenaikan dari posisi di tahun 2015 yang sebesar Rp 393,27 miliar. Biaya masih harus dibayar merupakan cadangan berkaitan dengan

operasional bank seperti beban listrik, air dan telepon zakat perusahaan, jasa konsultan dan cadangan untuk personalia seperti cadangan bonus, kinerja, promosi, pelatihan dan biaya seragam untuk karyawan.

i. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia hingga akhir tahun 2016 meningkat sebesar 47,88%.

3. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer turun sebesar 4,43% jika dibandingkan dengan tahun 2015 dimana pada tahun 2016 dana syirkah temporer tercatat sebesar Rp 42,69 triliun dan di tahun 2015 tercatat sebesar Rp 44,67 triliun.

a. Dana Syirkah Temporer Bukan Bank

Dana Syirkah Temporer Bukan Bank mengalami penurunan sebesar 7,67%. Penurunan Dana Syirkah Temporer Bukan Bank terjadi pada Giro Mudharabah, Tabungan Mudharabah dan deposito berjangka Mudharabah yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 46,87%, 7,60% dan 6,02%.

b. Dana Syirkah Temporer Bank

Kenaikan terjadi pada Dana Syirkah Temporer Bank yang naik sebesar 21,84%. Kenaikan ini dikontribusikan oleh kenaikan Giro Mudharabah sebesar 126,55%. Tabungan Mudharabah pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 41,92% dibandingkan tahun 2015.

c. Surat berharga yang diterbitkan

Pada tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia memiliki Surat Berharga yang diterbitkan senilai Rp 1,5 triliun, jumlah yang sama

dari tahun sebelumnya. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Sukuk Mudharabah Subordinasi Berkelanjutan I tahap I dan II.

4. Ekuitas

Pada tahun 2016, total ekuitas Bank Muamalat Indonesia tercatat sebesar Rp 3,62 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 100 miliar, atau setara 2,58% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 3,52 triliun, yang sebagian besar dipicu oleh meningkatnya saldo laba ditahun 2016.

4.4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Pada tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia berhasil membukukan laba bersih meningkat sebesar 8,08% dari tahun 2015. Hal ini didukung oleh upaya perbaikan kualitas portofolio pembiayaan dan efisiensi yang telah dilakukan selama tahun 2016. Disamping itu upaya-upaya efisiensi biaya operasional disepanjang 2016 telah memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank secara total.

1. Pendapatan margin

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib atau disebut juga Pendapatan Margin Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan sebesar 23,20% dari tahun 2015.

2. Beban margin

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer atau Beban Margin turun sebesar 19,33% dari tahun 2015. Penurunan beban margin tersebut merupakan hasil dari upaya Bank Muamalat Indonesia dalam *reprofiling* dana pihak ketiga dan juga upaya peningkatan penghimpunan tabungan dan giro.

3. Pendapatan operasionallainnya

Bank Muamalat Indonesia mencatat Pendapatan OperasionalLainnya di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,14%. Kenaikan ini didominasi oleh pendapatan jasa layanan yang naik signifikan sebesar 235,22%.

4. Beban operasional

Beban Operasional yang terdiri dari beban kepegawaian, beban umum dan administrasi, beban usaha lainnya, dan beban non usaha mengalami penurunan sebesar 15,03% dari tahun 2015.

5. Beban cadangan kerugian penurunan nilai

Bank Mumalat Indonesia telah mencadangkan biaya atas kemungkinan terjadinya suatu risiko, terutama risiko pembiayaan.

6. Laba operasional, non-operasional dan laba sebelum pajak

Pada tahun 2016, laba operasional tercatat sebesar Rp 85,77 miliar, mengalami penurunan dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 167,13 miliar. Namun laba non-operasional mengalami peningkatan sehingga, laba sebelum pajak meningkat sebesar 6,93% dibandingkan di tahun 2015.

7. Pajak penghasilan

Beban pajak mengalami peningkatan sebesar 4,45% dari tahun 2015. Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 35,95% miliar, sementara pada tahun 2015 tercatat Rp 34,42 miliar.

8. Laba bersih

Setelah memperhitungkan beban pajak, maka laba bersih Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2016 naik sebesar 8,08%.

9. Total laba komprehensif

Total laba komprehensif Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015, dimana total pendapatan komprehensif lain bersih setelah pajak sebesar Rp 100,15 miliar pada tahun 2016.

4.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Jumlah ekuitas Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan tercatat pada tahun 2014 jumlah ekuitas sebesar Rp 3,92 triliun menjadi Rp 3,51 triliun di tahun 2015 dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi Rp 3,61 triliun.

4.4.4 Laporan Arus Kas

1. Arus kas dari kegiatan operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasional untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,47 triliun. Arus kas terkoreksi terutama berasal dari penurunan dana syirkah temporer bukan bank, khususnya deposito. Penurunan deposito tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Bank Muamalat Indonesia untuk menurunkan beban dana.

2. Arus kas dari kegiatan investasi

Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi selama tahun 2016 adalah sebesar Rp 32,48 miliar, yang terdiri dari hasil penjualan investasi dari surat berharga dan perolehan investasi pada surat berharga. Sementara itu, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 23,99 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp 206,48 miliar.

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Selama tahun 2016 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 1,11 triliun yang berasal dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 6,51 triliun dan pencairan sertifikat investasi

Mudharabah sebesar Rp 250 miliaran. Arus kas keluar terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp 5,64 triliun.

4.4.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Pendapatan usaha utama Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan, tercatat pada tahun 2015 total pendapatan usaha utama sebesar Rp 4,94 triliun menjadi Rp 3,80 triliun di tahun 2016. Sementara itu, laba operasi yang tersedia untuk bagi hasil juga mengalami penurunan dari Rp 4,98 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 3,61 triliun di tahun 2016.

4.4.6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat pada Bank Muamalat Indonesia menyajikan sumber dana zakat yang berasal dari dalam entitas syariah mengalami kenaikan dari Rp 1,42 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 1,87 miliar pada tahun 2016. Sedangkan dari luar entitas syariah juga mengalami sedikit kenaikan dari Rp 11,10 di tahun 2015 miliar menjadi Rp 11,14 miliar pada tahun 2016. Selanjutnya, dana zakat tersebut disalurkan melalui Baitul Maal Muamalat, Dompot Dhuafa dan Badan Zakat Nasional. Jumlah penyaluran dana zakat Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2015 menjadi Rp 13 miliar.

4.4.7 Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan

Berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia menyajikan informasi dana kebajikan yang berasal dari denda mengalami penurunan dari Rp 4,22 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 44,88 juta. Sedangkan, dana kebajikan yang berasal dari pendapatan non halal mengalami penurunan dari Rp 5,69 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 1,30 miliar pada tahun 2016. Selanjutnya dana

tersebut digunakan untuk sumbangan sosial. Jumlah sumbangan sosial Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan dari Rp 5,69 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 1,30 miliar pada tahun 2016.

4.4.8 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan pada Bank Muamalat Indonesia menyajikan informasi mengenai pendirian Bank Muamalat Indonesia serta informasi umum lainnya seperti mengenai anggaran dasar, jaringan unit kerja dan pemegang saham mayoritas. Selain itu, informasi yang disajikan ialah mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi serta informasi-informasi yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan seperti agunan yang diambil alih, biaya emisi, informasi segemen operasi, penggunaan pertimbangan dan estimasi dan akuntansi yang signifikan, pertimbangan, usaha yang berkelanjutan dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah dinyatakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2014). Adapun mengenai beberapa penyajian informasi yang sedikit berbeda dari PSAK Nomor 101, hanya terbatas pada segi penyebutan istilah atau bahasa tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Selain itu, dari segi jumlah akun, akun-akun pada Bank Muamalat Indonesia lebih banyak dan lebih rinci dibandingkan jumlah akun yang terdapat dalam PSAK Nomor 101. Banyaknya jumlah akun pada suatu laporan keuangan tergantung pada kebutuhan suatu entitas yang dalam hal ini adalah entitas syariah.

5.2 Saran

Dari hasil seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan standar akuntansi syariah (PSAK 101) pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Secara umum telah digunakan standar yang ada yaitu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2014), namun dibutuhkan penyesuaian terhadap standar penggunaan bahasa atau istilah yang sama yaitu aturan standar bahasa atau istilah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101) yang telah disusun oleh IAI sehingga tidak membingungkan dan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma Buchari. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah* (Edisi Revisi). Bandung:Afabeta
- Anggriani. 2015. *Penerapan Syariah Compliance sebagai Prinsip Syariah Governance pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar:Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin.
- Anshar Fuad. 2008. *Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar:Program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin
- Antonio Muhammad Syafii. 2015. *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani
- Ismail. 2011. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Edisi Pertama, Cetakan ke-2). Jakarta:Kencana
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi). Jakarta:Rajawali Pers
- Kerangka Dasar SAK Syariah (www.iaiglobal.or.id, diakses 11 Juli 2017)
- Martani Dwi, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SPAK*. Jakarta Selatan:Salemba Empat
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers
- Nuhung Mahmud. 2014. *Bank Syariah (Studi Kualitas Jasa & Pemasaran Relasional)*. Makassar:Fahmis Pustaka
- Profil Bank Muamalat(www.bankmuamalat.co.id, diakses 11 Juli 2017)
- PSAK IAI. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta:IAI
- PSAK IAI.2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 tentang Laporan Arus Kas*. Jakarta:IAI
- Yaya Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)*. Jakarta:Salemba Empat
- Warsono Sony. 2012. *Al-Qur'an dan Akuntansi*. Yogyakarta:ABPUBLISHER
- WeygandthJerry J., Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel. 2013. *Accounting Principles* (Edisi ke-7). Jakarta:Salemba Empat